

Urgensi Peran Gubernur dalam Sistem Pemerintahan: Menjaga Stabilitas Politik dan Ekonomi Daerah

Alya Rahmi¹ Ariyantika Br Ginting² Hanifah Mardhiyah³ Hutri Ami⁴ Laili Tanzila⁵

Program Studi Teknologi Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: aljarahmi.5233151025@mhs.unimed.ac.id¹ ariyantika.5233151014@unimed.ac.id² hanifahm.5233151022@mhs.unimed.ac.id³ hutriami.5233351012@mhs.unimed.ac.id⁴ lailitanzila.5231151012@mhs.unimed.ac.id⁵

Abstrak

Gubernur menempati posisi strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, gubernur tidak hanya berperan sebagai penegak kebijakan pusat, namun juga menjaga stabilitas politik dan ekonomi daerah. Artikel ini mengkaji peran tersebut dengan pendekatan deskriptif analitis, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi gubernur dalam menjaga keharmonisan politik, mengelola pembangunan ekonomi, dan menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Analisis menunjukkan bahwa stabilitas politik dan ekonomi yang sehat sangat bergantung pada kemampuan gubernur dalam berinovasi dan membangun sinergi dengan pemangku kepentingan. Rekomendasi kebijakan mencakup peningkatan otonomi fiskal dan penguatan kapasitas gubernur dalam manajemen krisis dan pengambilan keputusan strategis.

Kata Kunci: Gubernur, Sistem Pemerintahan, Stabilitas Politik, Ekonomi Daerah, Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

Governors occupy a strategic position in the government system Indonesia as a liaison between the central and regional governments. In this context, the governor not only acts as an enforcer of central policy, but also maintains regional political and economic stability. This article examines the role with a descriptive analytical approach, focusing on the challenges faced by governors in maintaining political harmony, managing political economic development, and ensuring the sustainability of regional development. Analysis shows that political stability and a healthy economy are highly dependent on the governor's ability to innovate and build synergy with stakeholders. Policy recommendations include increasing fiscal autonomy and strengthening governors' capacity in crisis management and strategic decision-making.

Keywords: Governor, Governance System, Political Stability, Regional Economy, Sustainable Development



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan sistem desentralisasi, Indonesia memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya, termasuk dalam menentukan kebijakan pembangunan, tata kelola pemerintahan, dan stabilitas politik. Kebijakan desentralisasi ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Melalui sistem ini, gubernur memiliki peran sentral sebagai pemimpin daerah tingkat provinsi sekaligus perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dualitas peran ini menjadikan gubernur sebagai aktor kunci yang menghubungkan kepentingan lokal dengan kebijakan nasional. Sebagai kepala daerah, gubernur bertanggung jawab dalam mengelola pemerintahan provinsi secara efektif dan efisien. Ia memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayahnya. Selain itu, gubernur

juga berfungsi sebagai wakil pemerintah pusat yang bertugas memastikan bahwa kebijakan nasional dapat diterapkan di tingkat lokal dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik daerah. Dualitas peran ini memberikan tantangan tersendiri, karena gubernur harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan lokal dan tuntutan nasional. Dalam konteks ini, kemampuan gubernur untuk memahami kompleksitas peran tersebut sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

Stabilitas politik dan pembangunan ekonomi daerah menjadi dua fokus utama dalam peran gubernur. Stabilitas politik berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemerintahan daerah. Di lingkungan politik yang stabil, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan publik dapat berjalan dengan lebih efektif. Sebaliknya, instabilitas politik, seperti konflik antara legislatif dan eksekutif atau ketegangan sosial di masyarakat, dapat menghambat jalannya pemerintahan daerah dan bahkan berisiko memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, gubernur dituntut untuk memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat serta kemampuan mediasi dalam mengelola dinamika politik lokal. Di sisi lain, pembangunan ekonomi diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola potensi ekonomi lokal, seperti sumber daya alam, pariwisata, dan sektor UMKM. Gubernur bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, gubernur juga memiliki peran penting dalam menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui penyederhanaan regulasi, pembangunan infrastruktur, dan promosi potensi daerah. Dengan demikian, stabilitas politik dan pembangunan ekonomi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan membutuhkan perhatian serius dari gubernur. Namun, tantangan yang dihadapi gubernur dalam menjalankan peran tersebut tidaklah mudah. Pada konteks politik, gubernur sering kali dihadapkan pada konflik antar aktor politik lokal, seperti legislatif daerah, partai politik, dan kelompok masyarakat tertentu. Konflik ini dapat muncul karena perbedaan kepentingan, baik terkait alokasi anggaran, kebijakan publik, maupun isu-isu strategis lainnya. Selain itu, gubernur juga menghadapi tekanan kebijakan dari pemerintah pusat, yang kadang-kadang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan atau kondisi daerah. Misalnya, kebijakan nasional yang bersifat top-down sering kali tidak mempertimbangkan dinamika lokal, sehingga menimbulkan resistensi di tingkat daerah. Dalam situasi seperti ini, gubernur harus mampu berperan sebagai mediator yang dapat menjembatani perbedaan kepentingan tersebut. Tantangan lainnya adalah kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Dengan perkembangan zaman, masyarakat memiliki harapan yang semakin tinggi terhadap pemerintah daerah, terutama dalam hal pelayanan publik, akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Sebagai pemimpin daerah, gubernur harus mampu merespons kebutuhan ini dengan kebijakan yang inovatif dan tepat sasaran. Selain itu, gubernur juga perlu memastikan bahwa program-program pembangunan yang dirancang dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial atau ekonomi di wilayahnya. Pada pembangunan ekonomi, gubernur juga dihadapkan pada tantangan globalisasi dan perubahan ekonomi global. Misalnya, fluktuasi harga komoditas di pasar internasional dapat memengaruhi pendapatan daerah, terutama bagi provinsi yang bergantung pada ekspor sumber daya alam. Selain itu, dampak perubahan iklim dan bencana alam juga menjadi faktor yang dapat menghambat pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, gubernur perlu memiliki kemampuan untuk merancang kebijakan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan potensi risiko. Meski demikian, tantangan-tantangan ini juga membuka peluang bagi gubernur untuk

menunjukkan kapasitas kepemimpinannya. Dengan memanfaatkan otonomi daerah secara optimal, gubernur dapat merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Selain itu, kerja sama yang erat antara gubernur dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti legislatif, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, juga dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut. Sebagai kesimpulan, peran gubernur dalam sistem pemerintahan Indonesia tidak hanya bersifat administratif tetapi juga strategis. Dalam menjalankan tugasnya, gubernur harus mampu menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi fondasi utama bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan kapasitas kepemimpinan yang kuat, kemampuan beradaptasi terhadap dinamika lokal dan nasional, serta komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, gubernur dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta laporan terkait peran gubernur dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis data sekunder yang relevan guna menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami dinamika peran gubernur dalam konteks desentralisasi dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan simpulan yang valid dan akurat, sekaligus memastikan bahwa analisis yang disajikan dalam artikel ini memiliki landasan ilmiah yang kuat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis dalam memahami dan mengoptimalkan peran gubernur dalam sistem pemerintahan Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gubernur sebagai Pemimpin Politik di Daerah

Sebagai pemimpin politik, gubernur memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas politik di tingkat provinsi. Peran ini mencakup penyelesaian konflik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan eksekutif, mengelola dinamika politik lokal, serta memastikan keberlangsungan pemerintahan yang demokratis dan transparan. Stabilitas politik di tingkat provinsi menjadi prasyarat penting bagi pelaksanaan kebijakan publik yang efektif dan efisien. Misalnya, di Provinsi Aceh, gubernur memainkan peran penting dalam mengelola hubungan antara kelompok politik lokal, terutama setelah berakhirnya konflik panjang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah pusat. Gubernur menjadi aktor kunci dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan damai, termasuk implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang memberikan otonomi khusus kepada provinsi tersebut. Melalui pendekatan dialogis dan negosiasi, gubernur mampu menciptakan harmoni antara berbagai kelompok politik lokal yang sebelumnya berseteru. Selain itu, gubernur juga berperan sebagai penjaga integrasi sosial-politik di wilayahnya, terutama ketika terjadi gesekan politik akibat perbedaan kepentingan antar aktor lokal. Dalam konteks ini, kemampuan gubernur untuk bertindak sebagai mediator, fasilitator, dan pemimpin yang inklusif sangat menentukan keberhasilan dalam menjaga stabilitas politik daerah.

Gubernur sebagai Pembuat Kebijakan Ekonomi

Dalam pembangunan ekonomi, gubernur bertugas mengarahkan kebijakan strategis yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Peran ini mencakup penyusunan rencana pembangunan daerah, pengelolaan anggaran, serta pengembangan sektor-sektor unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Tengah, gubernur memprioritaskan pengembangan sektor manufaktur yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Kebijakan tersebut mencakup penyediaan kawasan industri terpadu, seperti Kawasan Industri Kendal, yang telah berhasil menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Selain itu, gubernur juga mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di kota-kota besar seperti Semarang dan Solo. Sektor ini mencakup industri fesyen, kerajinan tangan, hingga pariwisata berbasis budaya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Lebih jauh, gubernur juga bertanggung jawab untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini dilakukan melalui penyederhanaan regulasi, pembangunan infrastruktur pendukung, dan promosi investasi di tingkat nasional maupun internasional. Dengan kebijakan yang terarah, gubernur dapat memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan tetapi juga pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya.

Gubernur sebagai Fasilitator Hubungan Pusat Daerah

Gubernur berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam peran ini, gubernur harus mampu menyelaraskan kebijakan nasional yang sering kali bersifat umum dengan kebutuhan spesifik masyarakat di tingkat lokal. Tantangan utama dalam peran ini adalah memastikan bahwa kebijakan pusat tetap relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis daerah. Sebagai contoh, gubernur di daerah-daerah terpencil seperti Papua dan Maluku menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan nasional yang cenderung dirancang untuk daerah dengan infrastruktur yang lebih maju. Dalam situasi ini, gubernur dituntut untuk berinovasi dan menyesuaikan kebijakan nasional agar dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, gubernur juga bertugas menyampaikan aspirasi masyarakat daerah kepada pemerintah pusat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Peran ini menjadi semakin penting dalam konteks desentralisasi, di mana hubungan pusat-daerah harus didasarkan pada prinsip kemitraan dan saling mendukung. Dengan demikian, keberhasilan gubernur dalam menjalankan peran ini tidak hanya berdampak pada daerah yang dipimpinnya tetapi juga pada keberhasilan kebijakan nasional secara keseluruhan.

Gubernur sebagai Mediator Konflik Lokal

Di banyak daerah, gubernur berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik horizontal yang terjadi di masyarakat. Konflik-konflik ini dapat berupa perselisihan antar kelompok masyarakat, sengketa lahan, atau ketegangan akibat perbedaan budaya dan agama. Sebagai pemimpin daerah, gubernur dituntut untuk memiliki kemampuan mediasi yang baik agar dapat menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Di Kalimantan Timur, misalnya, gubernur berhasil meredakan konflik antara masyarakat adat dan perusahaan tambang terkait dengan pengelolaan lahan. Melalui pendekatan mediasi, gubernur melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat adat, pemerintah daerah, dan perusahaan, dalam dialog yang konstruktif. Hasilnya adalah tercapainya kesepakatan yang tidak hanya mengakhiri konflik tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dari aktivitas tambang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Pendekatan serupa juga dilakukan di daerah lain yang menghadapi

tantangan serupa. Dalam hal ini, gubernur tidak hanya bertindak sebagai mediator tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu masyarakat menemukan solusi atas permasalahan mereka.

Gubernur sebagai Penggerak Pembangunan Daerah

Sebagai penggerak pembangunan daerah, gubernur bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan program-program pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peran ini mencakup pengembangan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Di Provinsi Bali, misalnya, gubernur berhasil mengembangkan infrastruktur pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan bandara internasional, jalan tol, dan fasilitas wisata lainnya telah berhasil meningkatkan daya tarik Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia. Di sisi lain, di provinsi yang memiliki karakteristik berbeda seperti Nusa Tenggara Timur, gubernur fokus pada pengembangan sektor pertanian dan peternakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor primer yang menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat lokal. Pembangunan daerah yang berhasil tidak hanya ditentukan oleh alokasi anggaran tetapi juga oleh kemampuan gubernur untuk memobilisasi sumber daya dan mengoptimalkan potensi lokal. Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat, gubernur dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan berdampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayahnya.

Pada hakikatnya, peran gubernur dalam sistem pemerintahan daerah mencerminkan tanggung jawab multidimensional yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan pembangunan. Gubernur memiliki kewajiban menjaga stabilitas politik yang menjadi landasan bagi terciptanya pemerintahan yang efektif dan harmonis. Pada aspek ekonomi, gubernur bertugas menyusun kebijakan strategis yang tidak hanya mendorong pertumbuhan tetapi juga memastikan pemerataan kesejahteraan. Sebagai fasilitator hubungan pusat dan daerah, gubernur berperan penting menyelaraskan kebijakan nasional agar lebih relevan dan berdampak nyata sesuai kebutuhan lokal. Ketika menghadapi dinamika sosial, gubernur menjalankan peran sebagai mediator konflik lokal yang menunjukkan pentingnya pendekatan dialogis dan inklusif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat. Selain itu, sebagai penggerak pembangunan, gubernur harus mampu memobilisasi sumber daya dan mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sinergi dari kelima peran tersebut menjadikan gubernur sebagai aktor kunci dalam mendukung stabilitas dan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah maupun nasional.

KESIMPULAN

Gubernur memegang peran yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, terutama dalam konteks desentralisasi yang memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah. Sebagai pemimpin politik, gubernur memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas politik yang menjadi prasyarat utama bagi keberlangsungan pemerintahan yang efektif. Pada aspek ekonomi, gubernur berperan dalam merancang kebijakan pembangunan yang memanfaatkan potensi lokal sekaligus mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan. Sebagai fasilitator hubungan pusat dan daerah, gubernur memastikan kebijakan nasional dapat diadaptasi sesuai kebutuhan lokal, sehingga meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Selain itu, gubernur juga berperan sebagai mediator yang mampu menyelesaikan konflik-konflik lokal secara adil dan berkelanjutan. Dalam hal pembangunan daerah, gubernur menjadi motor penggerak yang memastikan program-program pembangunan berjalan optimal dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya meningkatkan kapasitas kepemimpinan gubernur melalui pelatihan

manajemen konflik, pengelolaan kebijakan ekonomi, dan pendekatan komunikasi yang inklusif. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat sinergi dalam penyusunan kebijakan, terutama untuk daerah dengan tantangan geografis dan sosial yang unik. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merancang strategi kebijakan daerah yang lebih responsif, inovatif, dan berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada pengembangan model kepemimpinan daerah yang relevan dengan dinamika global dan tantangan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, M. (2018). *Desentralisasi dan Pembentukan Pemerintahan Daerah yang Efektif*. Jakarta: Salemba Empat
- Anderson, P. (2009). *Political Leadership and Governance*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Bappenas. (2020). *Laporan Tahunan Pembangunan Daerah: Analisis Kebijakan Ekonomi di Daerah*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Baswir, R., & Hartono, R. (2017). *Ekonomi Indonesia dalam Sistem Perekonomian Global*. Yogyakarta: UGM Press.
- Fahmi, A. (2017). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Pembangunan Daerah: Studi Kasus di Jawa Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 88-100.
- Hasan, A. (2016). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kurniawan, D. (2017). Otonomi Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1), 45-60.
- Mardiasmo, M. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Pengantar dan Aplikasinya dalam Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Putra, P. A. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Ekonomi: Studi Kasus di Bali. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 110-123.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Steiner, J., & Alpern, A. (2015). *Public Policy and Governance: A Global Perspective*. New York: Oxford University Press.
- Sukoco, A. (2019). *Manajemen Pemerintahan Daerah: Perspektif dan Implementasi*. Surabaya: Penerbit Tiga Serangkai.
- Winarno, W. (2018). *Stabilitas Politik dan Pembangunan Ekonomi: Perspektif Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press.